



SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KALAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 54. Padang 25137 Tlp. 0751-40818 Fax 0751-40811.40817

Koran		Hlm
Haluan		
Padang Ekspres		
Singgalang	✓	1
Posmetro		
.....		

Tahun: 2017			
Bulan:			
Jan		Jul	
Feb		Agust	
Maret		Sep	
April		Okt	
Mei		Nov	
Jun	✓	Des	

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				



SERAHKAN - Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Eliza menyerahkan dokumen WTP LKPD 2017 Pasaman kepada Bupati Yusuf Lubis di aula Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat di Padang, Selasa, (6/6). (chandra firman)

Pasaman Peroleh WTP

PASAMAN - Kabupaten Pasaman kembali berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal evaluasi penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016.

Bersambung ke hlm A-2

Pasaman ...

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Eliza kepada Bupati Yusuf Lubis bertempat di aula Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat di Padang, Selasa, (6/6)

"Predikat opini WTP tahun ini, merupakan prestasi yang keempat kalinya diraih oleh Pasaman. Sebelumnya telah pernah meraih predikat opini WTP atas penilaian LKPD 2013, 2014, 2015 dan 2016", ujar Kepala BPKD Pasaman Mulyatmin didampingi oleh Sekretaris M. Yasrin Syahputra.

Bupati Yusuf Lubis menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran BPK Provinsi Sumbar yang telah melakukan pembinaan, sehingga Pasaman berhasil meraih predikat WTP.

Ia juga mengucapkan terima

kasih kepada seluruh jajaran SKPD khususnya instansi terkait yang telah mengawal pengelolaan keuangan daerah itu. Tak lupa kepada DPRD setempat juga berperan mengawal akuntabilitas dan transparansi keuangan di pemerintahan tersebut.

"Terima kasih kepada jajaran BPK RI Sumbar yang senantiasa melakukan pembinaan secara berkala terhadap laporan keuangan pemerintah, dan SKPD yang telah bekerja keras, begitu juga DPRD atas pengawalan pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Bupati Yusuf menilai dari tahun-ketahun terjadi peningkatan kinerja yang ditandai dengan raih WTP atas pemeriksaan akuntabilitas keuangan Pemkab Pasaman, tiga kali hingga empat kali berturut-turut.

"Pengelolaan keuangan makin baik. Untuk itu tiap SKPD harus

semakin meningkatkan kemampuannya. Meski ada beberapa catatan, itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk perbaikan ke depannya," kata Bupati.

Ia menegaskan akan terus menjalankan komitmennya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Upaya reformasi birokrasi akan terus digalakkan dalam rangka terwujudnya masyarakat Pasaman sejahtera, agamis dan berbudaya.

Lebih lanjut Kepala BPKD Mulyatmin didampingi Sekretarisnya M. Yasrin menambahkan, Pemkab Pasaman dalam merealisasikan anggaran keuangan daerah saat ini sangat terbuka.

"Seperti yang sering ditekankan Pak Bupati, setiap sen dana daerah yang dikeluarkan, harus sesuai peruntukannya dan harus sesuai pula dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku, termasuk anggaran untuk bupati sekalipun," ungkap Mulyatmin.

Dia menambahkan, Pemkab Pasaman saat ini memang telah membuka-bukaan soal anggaran daerah. Hal ini sesuai dengan turutan undang-undang nomor : 41 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Pada setiap akhir tahun anggaran, kita selalu menayangkan realisasi capaian kegiatan dan realisasi keuangan Pemkab Pasaman di sejumlah media mass surat kabar, paling sedikit dua halaman Koran, termasuk instruksi Bupati kepada asisten pemerintahan untuk mengiklankan pula Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di surat kabar sebagai bentuk upaya kami menjalankan komitmen pemerintahan yang transparan tutup Mulyatmin kemarin. (202)